

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesta demokrasi baru saja dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, dimana banyak hal-hal baru yang muncul proses pemilu tersebut, hal-hal yang baru muncul pada pemilu kali ini banyak partai-partai yang baru bermunculan. Seperti pemilu tahun 1999 kemarin partai peserta pemilu kali ini pun masing-masing mempunyai visi dan misi, yang masing-masing mereka tonjolkan dalam setiap kampanye partai mereka. Tentu saja hal ini menjadi pandangan baru bagi dunia politik bangsa Indonesia, kompetisi yang ditampilkan masing-masing partai baru untuk memperoleh suara pada pemilu legislatif sangat beragam, dimana partai-partai baru harus bersaing dengan partai yang lebih lama berkecimpung di dunia politik kita, dan tentu saja bagi partai yang baru ini merupakan suatu kendala yang tidaklah mudah untuk mengenalkan serta menarik pendukung bagi partai mereka. Namun kenyataannya banyak partai baru pada pemilu tahun 2004 kali ini memperoleh suara yang cukup signifikan, karena partai-partai baru ini mampu mempercundangi partai-partai lama.

Pemilu legislatif adalah tahap pertama dari rangkaian tahapan Pemilu 2004. Pemilu legislatif ini diikuti 24 partai politik, dan telah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Pemilu ini bertujuan untuk memilih partai politik (sebagai persyaratan Pemilu presiden) dan anggotanya untuk dicalonkan

partai baru bermunculan. Jadi, masyarakat mulai belajar partai mana yang sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini bisa dilihat pada masa kampanye. Partai yang berjanji mewujudkan pemerintahan yang bersih mendapatkan banyak simpati dari masyarakat. Sementara rakyat banyak yang kecewa pada partai lama, walaupun mereka masih punya pendukung kuat. Dalam Partai Demokrat perolehan suara yang diraih partai ini tidak lepas karena Partai Demokrat berusaha untuk membangun visi masa depan kepemimpinan yang kuat, dan hal ini didukung dengan hadirnya Susilo Bambang Yudhoyono. Perlu kita ketahui bahwa pengunduran diri Susilo Bambang Yudhoyono, pada kabinet Megawati, banyak menimbulkan pertanyaan dari para pengamat politik kita, mungkin saja ini merupakan langkah kongkrit dan tepat yang diambil oleh Partai Demokrat untuk menaikkan pamor Partai pada pemilu legislatif. Tetapi harus dicermati juga, bahwa masyarakat tidak semata membutuhkan public figure tetapi juga pembaruan. Jadi, jangan hanya terpaku pada satu orang saja, tetapi juga sistem. Memang kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono dalam Partai Demokrat sangat berpengaruh sekali. Partai pun ikut terkenal di masyarakat, dan banyak masyarakat yang memilih Partai Demokrat karena adanya sosok Susilo Bambang Yudhoyono di belakang partai ini.

Pemilu legislatif 5 April dan pemilihan presiden putaran pertama 5 Juli 2004 yang baru lalu memunculkan banyak fenomena politik yang menggembarakan sekaligus menimbulkan kekhawatiran baru. Fenomena paling menarik dari rangkaian pesta demokrasi lima tahunan ini adalah kemunculan Susilo Bambang Yudhoyono biasa dipanggil SBY.

presiden pada sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Juli 2001. peristiwa kekalahan itulah membuat beberapa anggota MPR tersebut untuk mendirikan sebuah partai sebagai kendaraan politik susilo Bambang yudhoyono untuk maju dalam pemilihan presiden tahun 2004, selain itu ide pembentukan Partai Demokrat juga merupakan sumbangin dari Susilo Bambang Yudhyono sendiri.

Banyak pengamat politik menilai bagaimana seandainya Partai Demokrat tanpa kehadiran seorang Susilo Bambang Yudhoyono ? tentu dalam hal perolehan suara Partai tidak akan memperoleh suara yang banyak, tetapi sebagai pendiri partai, Susilo Bambang Yudhoyono juga mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat presiden Republik Indonesia terpilih, dan akhirnya menjadi presiden Indonesia untuk periode 2004-2009.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Pola hubungan Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat dalam Politik di Indonesia”?

C. Kerangka Dasar Teori

Untuk menganalisis suatu permasalahan diperlukan landasan yang dapat dijadikan acuan berpikir. Kerangka yang menjadi landasan pemikiran

dan kerangka konsep dan teori. Hal ini digunakan untuk mempermudah

pemahaman kita akan konsep-konsep yang digunakan dalam menganalisis permasalahan. Kerangka dasar teori yang menjadikan acuan dari penulisan ini antara lain :

1. Partai Politik

1.1 Pengertian Partai Politik

Sebelum membahas Partai politik, maka yang paling mendasar kita harus mengetahui pengertian dari partai politik itu sendiri.

Ada banyak pengertian tentang Partai politik yang dikemukakan oleh beberapa sarjana politik yang akan menjadi acuan pada penelitian ini.

Menurut kamus ilmiah Populer :

Partai : kelompok; golongan (mazhab) politik

Politik : ilmu kenegaraan/tata negara :sebagai kata kolektif yang menunjukkan pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan.

Jika melihat paparan secara etimologi diatas maka secara terminologi ialah :

Partai politik ialah sebuah kelompok atau golongan politik yang bergelut di bidang ketatanegaraan atau tata negara dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan⁴.

partai politik itu lebih dari dari tiga partai hal ini lebih membuka peluang bagi partai politik untuk bersaing mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan serta menggunakannya untuk menjalankan roda pemerintahan yang diraihnya, dalam perjalanannya sebuah partai politik yang telah mendapatkan kekuasaan atau suara terbanyak dalam pemilu dan menjalankan program-program partainya untuk merealisasikan, karena ini tidak akan berjalan atau sangat sukar untuk diwujudkan tanpa adanya kekuasaan yang melekat pada partai tersebut.

2. *Miriam D. Irish dan Elke Frank :*

“political party as an alignment of individual members (voter) organized to choose, influence, and control those in positions of political power (officerholder)”⁶

3. *Carl J. Friedrich*

Partai politik adalah : “sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiiil maupun materiil”

(a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further

⁶ Miriam D Irish and Elke Frank, introduction to Comparative politics, (rentice-hall, inc Englewood

*objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*⁷.

4. *Mark M. Hagopian*

“Partai politik ialah sesuatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam rangkaian prinsip dan kepentingan ideologisnya melalui karakter kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat⁸”

Pendapat para sarjana tersebut diatas pada intinya ialah bahwa partai politik adalah merupakan persekutuan dari individu-individu yang diorganisasikan untuk memilih, mempengaruhi, dan mengontrol jabatan-jabatan politik. Jadi disamping partai politik juga mempunyai tujuan untuk mendapat dan mempertahankan kekuasaan guna mengendalikan roda pemerintahan serta merealisasikan program-program partai, partai politik juga dituntut untuk dapat mempengaruhi dan mengontrol kebijakan-kebijakan yang sekiranya tidak berpihak kepada masyarakat, karena pada dasarnya dukungan suara rakyat lebih diperlukan untuk kesuksesan sebuah partai politik.

Dari paparan para sarjana diatas mungkin telah mengetahui secara garis besar dengan apa yang dimaksud dengan partai politik, partai politik ialah :

“Partai politik pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan-

⁷ *ibid*, hal.200

⁸ Mark M. Hagopian “Regimes, Movement and Ideology” New York and London, Lagman 1978 dalam

tujuan, dan orientasi-orientasi yang sama. Dimana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya untuk mempertahankannya atau memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan/mengontrol jalannya roda pemerintahan, yang kesemuanya itu pada gilirannya sebagai pangkal tolak organisasi tersebut dalam usahanya merealisasikan atau melaksanakan program-program yang telah ditetapkan”

Jelas sudah bahwa eksistensi serta kekuasaan yang di dapat oleh sebuah partai politik itu tidak terlepas dari dukungan masyarakat, oleh karena itu setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selayaknya harus berpihak kepada rakyat bukan berpihak kepada partai yang nota benanya untuk kepentingan golongan atau individu.

1.2 Sejarah Sistem Kepartaian di Indonesia

Kepartaian Sebelum Kemerdekaan

Sejarah awal sistem kepartaian di Indonesia diawali dengan ahirnya berbagai organisasi yang bergerak dibidang sosial dan pendidikan. Beberapa organisasi tersebut antara lain: Boedi oetomo (1908) yang bersifat Jawa sentris dan bergerak dibidang pendidikan. Namun nama ini kemudian berubah menjadi Budi Utana sebagai pencerminan hilangnya sifat jawa sentris tadi. Budi Utana (1935) bersatu dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) menjadi Parindra (Partai Indonesia Raya) dan bergerak dibidang politik

Sarekat Dagang Islam (1911), yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam (1923) dan menjelma menjadi PSII (1929). Indische Partij (1912) yang dibentuk agar Hindia Belanda tetap dibawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Indische Sosial democratische Vereniging (ISDV) (1913) yang pada tahun 1920 menjelma menjadi Partai Komunis Hindia yang selanjutnya disebut PKI. PNI (1926) yang dibentuk oleh Ailegemene Studi Club di Bandung, bekas anggota-anggota Perhimpunan Indonesia di Belanda. Tujuan dari organisasi-organisasi tersebut adalah untuk mewarnai pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia dari sisi politik. Namun hal tersebut tidak tercantum secara terang-terangan akibat adanya pembatasan yang sangat ketat dari pihak kolonial.

Kepartaian 1945-1959

Ada beberapa konstitusi yang digunakan :

1945-1949	: UUD 1945
1949-1950	: Konstitusi RIS
1950-1959	: UUD Sementara 1950

Disebut sebagai masa kepemimpinan partai-partai politik dalam sejarah politik di Indonesia. Dalam UUD 1945 tidak ditemukan adanya kata partai politik dan pemilu. Adanya partai politik setelah merdeka bersumber dari Maklumat Pemerintah 3 November 1945, yang berisi anjuran pemerintah untuk menyelenggarakan pembentukan

Sistem Kepartaian dan Pemilu 1955

Beberapa ciri sistem kepartaian yang mewarnai pemilu 1955 :

Multi partai (didukung dengan UUDS 1950 yang sangat liberal). Landasan ideologi politik diluar ideologi negara. Sistem pelaksanaan pemilu menggunakan sistem proposional. Pada pemilu 1955 (yang berdasar UU No.7/1953) dihasilkan empat parpol besar, yakni: PNI (57 kursi), Masyumi (57 Kursi), NU (45 Kursi), PKI (39 kursi). Karena tidak ada partai yang mendapat suara mayoritas, maka harus ada koalisi dalam pemerintahan. Dalam praktek koalisi yang terjalin selalu rapuh dikarenakan pembentukan koalisi tidak berdasar teori, hanya berdasar perasaan suka atau pertimbangan emosional lain.

Ketahanan kabinet yang sangat rapuh tadi berperan dalam ciptakan instabilitas politik dan ekonomi. Kepartaian setelah Dekrit presiden Penyederhanaan partai politik yang ada sehingga hasilnya hanya ada 10 partai politik (PNI, NU, PKI, Partai Katholik, Parindo, Partai Murba, PSII, IPKI, Parkindo, Perti). Penyederhanaan berlanjut dengan dibubarkannya Masyumi dan PSII yang oleh Soekarno diklaim banyak terlibat PRRI/Permesta.

Partai dan Sistem Kepartaian Orde Baru

Keluarnya berbagai kebijakan yang sangat membelenggu partai, dibatasinya jumlah parpol, jaga stabilitas politik dan pemerintahan, kurangi polarisasi ideologi masyarakat dan sistem

kepemimpinan partai politik Lahirnya sistem kepartaian hegomonik yang sangat korelatif dengan sistem politik dan pemerintahan yang otoriter dalam rezim orde baru⁹.

1.3 Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian adalah suatu pola interaksi antara partai politik dalam satu sistem politik yang menentukan format dan mekanisme kerja satu sistem pemerintahan. Ada tujuh macam sistem kepartaian, antara lain:

1. Atomized

Bentuk awal primitif, fase awal demokrasi. Dasar kelompok ikatan etnis, primordial, atau sekte dengan derajat patronase yang sangat tinggi. Personifikasi struktur dan istitusi internal partai. Kehidupan partai tergantung individu. Problem utama : tokoh partai sulit menjadi tokoh nasional, sulit untuk dukung integrasi nasional. Konsekuensinya : partai efektif bentuk opini dan mobilisir massa, tingkat kompetensi antar partai sangat tinggi, tidak kondusif untuk pembangunan politik, agenda kebijakan publik tidak terfokus, corak kebijakan publik cenderung elitis.

2. Polarized

Prinsip dasar berdemokrasi mulai ditemukan masyarakat (social trust mulai tumbuh). Ideologi nasional mulai dikenalkan. *Cross cutting cleavage* dan *cross cutting interest* mulai kompleks dan

menjadi mulai inklusif. Struktur ideologi masih multi polar. Ada koalisi partai bentuk pemerintahan, koalisi bentuk oposisi. Problema utama : ideologi negara mulai dirumuskan, tapi sering berbenturan secara diametral dengan ideologi partai. Konsekuensinya : derajat militansi supporter partai masih tinggi, tingkat kompetensi tinggi dan politikal trust pada tatanan elit masih lemah, variasi isu pemerintahan mulai terarah (bisa dikategorikan), terjadi koalisi partai dengan dasar ideologi, mulai terbentuk mekanisme check and balance internal eksekutif.

3. Moderate

Sosial trust pada tataran massa diikuti mulai tumbuhnya politikal trust pada tataran elit. Ideologi nasional menguat. Struktur ideologi mengarah ke bipolar. Secara numerikal ada 5-6 partai. Ada koalisi partai bentuk pemerintahan, tapi tidak ada koalisi. Konsekuensinya : supporter partai mulai berubah menjadi voter, koalisi dilandasi oleh kesamaan prespektif, variasi isu pemerintahan tambah fokus, mekanisme check and balance dinamis, landasan bagi pembangunan politik kokoh.

4. Predominant

Ada partai suara mayoritas yang masih bisa diimbangi oleh koalisi partai politik lainnya. Ideologi nasional yang cenderung pragmatis. Ideologi partai multi polar. Sosial trust pada masyarakat

stabilitas politik untuk pembangunan ekonomi. Koalisi formalitas *unilateral motives*. Problem utama ideologi nasional menguat, buka peluang intervensi negara pada kehidupan partai politik sebagai *societal institution*, pragmatisme mulai menggeser ideologi hingga voter kembali berubah menjadi supporter. Konsekuensinya : terbentuk garis *center of politics* dan *peripheral area* dalam *decision making process*, partai mayoritas kuasai center partai lain (partai kecil berperan minimal di *peripheral*, ideologi tengah partai mayoritas absorb massa dan partai lain, isu publik mulai dikuasai partai mayoritas, elit aktif berpolitik massa pasif dimobilisasi, implementasi kebijakan pemerintahan bisa efektif.

5. Hegemonic

Suara partai lain tidak mungkin dekati apalagi bersaing dengan suara mayoritas. Ideologi nasional pragmatis dikuasai ideologi partai. *Political trust* elit berhadapan dengan *social distrust* massa. *Autonomous participation* bergandengan *mobilized participation*. Parelisasi struktur partai mayoritas dengan struktur pemerintahan negara atau politisasi birokrasi. Implementasi kebijakan pemerintahan sangat efektif. *Uniformitas atasi pluralisme*.

Problem utama : sekalipun jaminan efektivitas pemerintahan tapi hilangkan pondasi membangun mekanisme politik yang demokratis (sebagai ciri masyarakat modern). Kebijakan pemerintah

nasional tinggi akan masyarakat terkoalisi dengan *common fate*, *shared trear* dan *unilitarian motives*, stabilitas sistem politik dan pemerintahan terjamin¹⁰.

Dalam sistem politik, partai politik memiliki sejumlah fungsi seperti representasi, konvensi, agregasi, intergrasi, rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga baru). fungsi partai politik sebagai berikut¹¹ :

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi publik.

Sebagai sarana komunikasi politik adalah menyalurkan aneka ragam dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dengan adanya hal tersebut maka pendapat dari berbagai kalangan dapat ditampung dan digabung dengan pendapat yang lain demikian juga aspirasi-aspirasi yang lain, proses ini disebut *interres aggregation* (penggabungan) setelah itu kemudian diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur atau dengan kata lain adalah *Interres articulation* (perumusan kepentingan). Dilain pihak partai politik berfungsi juga untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan demikian akan terjadi arus informasi serta dialog dari bawah keatas, dimana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat atau disebut sebagai *broker* (perantara).

¹⁰ Sulaksono, Tunjung, Hand out studi parpol.

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik

Dalam sebuah negara alat negara untuk mengatur sebuah konflik adalah salah satu dari fungsi partai politik, karena partai politik merupakan sarana sosialisasi dan juga apabila terjadi konflik/gap maka partai politik sebagai mediator untuk mengatasi atau menyelesaikan suatu permasalahan. Partai politik terkait langsung dengan yang namanya massa atau masyarakat dan hal tersebut menjadi dasar bagi fungsi politik apabila dalam suasana demokrasi yang didalamnya terdapat persaingan, dan perbedaan pendapat yang ada di dalam masyarakat.

1.4 Pola Hubungan

Pola Hubungan dalam politik dapat diartikan juga dengan tingkah laku atau perilaku politik yang mengembangkan sikap dan tindakan politik yang berorientasi pada kerjasama (kooperatif) dan membangun jaringan/ hubungan yang baik (harmoni, intergrasi) dengan semua pihak, khususnya organisasi tertentu atau partai politik dalam bentuk partisipasi politik.

Pola hubungan politik dalam aktualisasinya menunjukkan tiga kecenderungan orientasi :

Pertama, pola hubungan politik akomodasionis yang menunjukkan tingkah laku politis yang mengembangkan kerjasama dan hubungan baik dengan kelompok/organisasi tertentu secara kritis tanpa

1999 BAB I, ketentuan umum disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat, pemerintah negara yang dibentuk melalui pemilu itu adalah yang berasal dari rakyat, jalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat, sedangkan dalam undang-undang pemilu, DPR, DPD, dan DPRD tahun 2003 yaitu :

Pasal 2: Pemilu dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas , rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3: Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 4: Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 5: (1) Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota adalah partai politik.
(2) peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

Pasal 6: (1) pemilu memilih anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proposional dengan daftar calon terbuka. (2) pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik bernomor

Pemilu merupakan pranata terpenting dalam setiap negara demokrasi, pranata ini berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pengertian pemerintah secara teratur. Dari pendapat diatas, maka apabila dipahami lebih jauh pada hakekatnya pemilu merupakan ajang pesta demokrasi dimana rakyat diharapkan dapat berpartisipasi dengan aktif atau suatu sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam kursi pemerintahan. Apalagi muncul berbagai tuntutan dan harapan dari rakyat agar pemilu dapat mengatasi segala persoalan yang dihadapi bangsa baik berupa kemelut politik yang berkepanjangan, kemerosotan ekonomi maupun ancaman terhadap keamanan.

Kesuksesan sebuah Pemilu sangat berhubungan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam ikut serta mengikuti pemilihan umum. Oleh karena itu, bila sebuah negara akan menyelenggarakan pemilihan umum maka negara tersebut membutuhkan indikator-indikator guna mengukur partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pemilihan umum.

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat diukur diantaranya:

- Kesiediaan untuk didaftarkan atau mendaftarkan diri sebagai pemilih.
- Kesiediaan untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota dewan

2.2 Fungsi Pemilu

Pemilu merupakan beberapa fungsi yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pertama, sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintahan dan sistem politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku. Melalui Pemilu keabsahan pemerintah dapat ditegakkan, begitu juga program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah, berdasarkan hukum yang disepakati bersama, tidak hanya mempunyai otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya.

Kedua, fungsi perwakilan politik. Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik dalam rangka mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkan. Pemilu dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintah maupun lembaga legislatif.

Ketiga, pemilu sebagai mekanisme pergantian sirkulasi elit penguasa. Keterkaitan pemilu dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas untuk mewakili masyarakat luas.

Keempat, sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat.

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi

rakyat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi¹³.

2.3 Sistem Pemilu

Sistem pemilihan umum adalah sebagai salah satu alat rekayasa konstitusional yang bermanfaat untuk mengurangi konflik ditengah masyarakat yang masih terpecah-pecah. Pentingannya sistem pemilihan juga disebabkan bertidak sebagai saluran yang melalui warga negara dapat menuntut pertanggung jawaban dari para wakil terpilih mereka. Sedemikian strategis dan pentingnya sistem pemilu sehingga telah menjadi disiplin tersendiri dalam ilmu politik, walaupun di Indonesia belum diapresiasi dengan baik.

Kajian ilmu politik terhadap sistem pemilu dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, diantaranya:

1) Sistem pluralitas-minoritas

Sistem ini terdiri dari dua sistem pluralitas yaitu *First Past The Post (FPTP)* dan suara Blok (*Block Vote, BV*) serta dua sistem mayoritas, yakni suara Alternatif (*Alternative Vote, AV*) dan sistem dua babak (*Two Round System, TRS*). Dalam FPTP, pemilihan diselenggarakan dalam satu distrik (*Single member District*) dan pemenangnya adalah kandidat yang meraih jumlah suara terbanyak dan tidak harus meraih suara mayoritas.

2) Sistem Semi Proporsional

Sistem didasarkan pada terjemahan jumlah suara yang diperoleh menjadi kursi yang dimenangkan dengan cara-cara yang ada diantara sistem proporsional dan sistem pluralis-mayoritas.

3) Sistem Perwakilan Proporsional

Sistem ini didesain untuk mengurangi ketimpangan antara jumlah suara nasional suatu partai dengan jumlah kursi diparllemen. Sistem ini merupakan pemilihan perwakilan proporsional yang paling umum. Dimana mengharuskan partai menampilkan daftar calon di depan pemilih dan pemilih menentukan pilihannya pada partai bukan calon.

Pada pemilu 2004, pemilih tidak hanya memilih anggota DPR melainkan memilih juga anggota DPD. Inilah komposisi yang diharapkan benar-benar mewakili rakyat Indonesia. DPR adalah wujud keterwakilan (*Respresentation of Ideas*), sedangkan DPD adalah keterwakilan dalam kehadiran (*Representation of Presence*). Kursi DPR diperebutkan 550 kursi, sedangkan DPD paling banyak sepertiga jumlah DPR atau sekitar 124 kursi. Dengan pemilihan anggota DPR dan DPD diharapkan parlemen yang terbentuk pasca pemilu 2004 adalah cermin bangsa yang dapat melihat, merasa berfikir dan bertindak cepat yang mencerminkan rakyat secara keseluruhan atau disebut *Representatif Deskriptif (Representation Deskriptive)*

Persyaratan mengikuti pemilihan DPD jauh lebih berat dari pada pemilihan DPR. Hal terpenting kedudukan DPD dibawah DPR karena, Pertama, jumlah anggota DPD maksimal sepertiga jumlah anggota DPR. Kedua, tugas dan tanggung jawab DPD tidak sebanding dengan DPR. DPD tidak punya hak legislasi. DPD hanya berurusan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan otonomi daerah sehingga mirip dengan perluasan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Ketiga, DPD bisa diberhentikan oleh DPR dan Presiden sehingga DPD hanya merupakan *Weak Chamber* dibawah DPR dan Presiden.

Sistem pemilu secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem perwakilan rakyat dan kinerja pemerintahan. Pasca pemilu 2004, Indonesia akan memiliki lembaga legislatif melalui sistem yang berbeda dengan tugas yang berbeda pula. Sesuai UU pemilu dan RUU Susunan Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Rakyat, anggota DPD (DPRD) dipilih melalui sistem proporsional dengan daftar terbuka dan anggota DPD melalui sistem distrik¹⁴.

Tapi berdasarkan perkembangan Demokrasi pada bangsa kita, sistem pemilu pada kita pada tahun 2004 menggunakan sistem campuran keduanya karena pada Pemilu 2004, banyak Partai yang baru muncul, sehingga akan adanya kecenderungan ikatan emosional dan primodial yang sangat kental. Kecenderungan itu berdasarkan

sentimen suku, agama, daerah dan ras telah mempengaruhi pengorganisasian partai politik, sejalan dengan meningkatnya ketergantungan pada dukungan masyarakat untuk memenangkan pemilu.

Lewat desakan demokratisasi politik yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran politik rakyat, telah mampu menciptakan proses pembangunan politik yang benar-benar demokratis. Dalam hal ini terjadi gerakan cukup besar dalam proses politik rakyat melawan pengekangan untuk mencapai kebebasan. Rakyat tidak lagi bersedia hanya dijadikan obyek pembangunan. Ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pembangunan. Ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pembangunan bisa berhasil jika kadar partisipasi politik rakyat menguat dan diberi peluang.

Semua ini tercermin dari lahirnya partai baru yang jumlahnya tidak lagi dibatasi. Penguasa tidak berani bermain-main dan mencekal partai politik, karena hal ini diawasi oleh KPU. Banyak pertumbuhan partai politik yang baru, baik itu partai yang timbul akibat perpecahan dengan partai satunya. Dalam hal ini yang menjadi pendorong bermunculan partai baru sebenarnya sangatlah banyak.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitakukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Sehingga penelitian ini akan benar-benar terarah dengan baik dan jelas. Definisi operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari :

1. Pola Hubungan Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat dalam hal bentuk :
 - Hubungan Perintah Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kebijakan Partai Demokrat.
 - Hubungan Pengurus Partai Demokrat dengan Susilo Bambang Yudhoyono.
2. Peran dan pengaruh Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal pembentukan DPD di daerah-daerah
3. Implikasi Politis keberadaan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Partai Demokrat.

D. Definisi Konsepsional

Yang dimaksud dengan definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembahasan, pengertian antara konsep yang satu dengan yang lain.

1. Pola Hubungan

Sistem, cara kerja, bentuk struktur yang tetap, atau sesuatu yang bisa berpengaruh dalam suatu organisasi, baik itu dilihat dari kemajuan Partai yang diperoleh setelah kehadiran seseorang yang berpengaruh sampai masalah dalam Partai baik yang sekarang maupun yang akan datang.

2. Pemilu

Merupakan sarana Demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat, yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih pemimpin pemerintahan, dan untuk memilih anggota-anggota perwakilan rakyat.

3. Partai Politik

Suatu organisasi yang terdiri dari orang, sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan yang sama, serta orientasi yang sama pula, sehingga organisasi ini membutuhkan dukungan dari masyarakat dalam rangka memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan serta dapat menjalankan program-program partai yang telah ditentukan

F. Metode Penelitian

F.1. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana pola hubungan Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat dalam politik di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan bagi peneliti tentang besarnya pengaruh seseorang terhadap suatu parpol, sehingga parpol tersebut dapat memperoleh suara yang cukup signifikan dalam Pemilu.

2. Dapat memberikan masukan bagi Partai baik itu kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki Partai Demokrat, untuk dijadikan perbaikan pada pemilu legislatif periode tahun 2009.

F.2. Jenis penelitian

Dengan melihat permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif.

Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah sebagai suatu metode meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem kondisi, suatu sistem pemikiran atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki¹⁵.

¹⁵ Moh. Nasir, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Ghalia Indonesia, 1987, hal 105

F.3. Unit Analisis Data

Pada penelitian ini penyusun dalam mengumpulkan data yang digunakan untuk mengetahui secara lebih jelas, maka penyusun menentukan lokasi penelitian di kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di daerah Istimewah Yogyakarta. Hal ini karena data dan informasi data yang tersedia berada di kantor DPD Daerah Istimewah Yogyakarta.

F.4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari keterangan pihak-pihak yang berkompeten atau terkait dengan masalah yang ada di penelitian ini. Pihak yang dimaksud penyusun yaitu Partai Demokrat (PD) Daerah Istimewah Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dengan mencatat dari buku-buku, artikel-artikel karya ilmiah, koran, dokumen dan media lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

F.5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Interview

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada pengurus-

pengurus Partai Demokrat diantaranya Dewan Pembina Daerah (DPD), ketua DPD DIY dan Sekretaris Wilayah DIY.

b. Dokumentasi

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan naskah, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya.

F.6. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, sehingga teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh yaitu dengan analisis kualitatif deskriptif.

Metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian yang dilakukan adalah analisa kualitatif dimana data yang diperoleh diklarifikasikan, digambarkan dengan kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa sesuai dengan gejala/obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data/dasar teori yang ada serta untuk menilai makna

wawancara, catatan laporan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan

dan lain-lain untuk memperoleh berbagai data penelitian